

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln (dalam Azra 2008 : 39) tiga faktor yang merupakan tolok ukur umum sebuah pemerintahan demokratis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite demokrasi.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi di dalam pemerintahan berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan dalam negara sedangkan dalam kehidupan sehari-hari demokrasi sering dikaitkan dengan kebebasan. Ini sesuai dengan pendapat Zamroni (2011: 5) demokrasi sering dikaitkan dengan konsep kebebasan. Ada kandungan makna yang sama, tetapi antara keduanya tidaklah sama. Demokrasi amat jelas mengandung konsep kebebasan. Namun dalam demokrasi kebebasan tidak bersifat absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Batas kebebasan adalah tidak mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, dalam kehidupan demokrasi perlu pengaturan yang diwujudkan dalam berbagai aturan hukum yang mengikat. Berdasarkan pendapat Zamroni bahwa dalam demokrasi ada kebebasan akan tetapi kebebasan tidak dapat dituntut secara mutlak, tetapi tetap harus menghormati dan menghargai harkat dan martabat orang lain.

Di Indonesia demokrasi yang dilaksanakan adalah Demokrasi Pancasila, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai kepribadian bangsa Indonesia dimana nilai-nilai tersebut diambil dari nilai budaya, adat-istiadat dan nilai religius yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh bangsa kita adalah kepribadian bangsa kita sendiri bukan berasal dari bangsa atau negara lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Erwin, (2013: 135) demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa kita sendiri. Tidak perlu identik, artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan bangsa-bangsa lain. Pesan Bung Karno "*Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan*".

Pancasila sebagai nilai-nilai demokrasi bangsa Indonesia harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada Pancasila karena sebagai dasar negara. Menurut Zamroni, (2001: 65) nilai-nilai demokrasi yaitu: (1) Toleransi; (2) kebebasan mengemukakan pendapat; (3) menghormati perbedaan; (4) memahami keanekaragaman; (5) terbuka; (6) menjunjung nilai dan martabat manusia; (7) percaya diri; (8) tidak menggantungkan pada orang lain; (9) saling menghargai; (10) mampu mengekang diri; (11) kebersamaan; (12) keseimbangan.

### **2.1.1 Demokrasi Sebagai Norma hidup Bersama**

Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Demokrasi merupakan bentuk pembiasaan sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia untuk membentuk demokrasi yang ideal seperti pendapat John Dewey (1964: 86) terdapat dua elemen dalam demokrasi yang ideal, (1) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umum tetapi mengandalkan pada pengakuan kepentingan bersama, (2) tidak hanya interaksi kelompok-kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial.

Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang ideal dukungan sosial dan lingkungan adalah mutlak dibutuhkan. Menurut Azra (2008: 40) ada enam(6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah sebagai berikut.

*Pertama*, kesadaran akan pluralisme. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam

pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.

*Kedua*, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

*Ketiga*, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi, kepemimpinan, dan aturan mainnya) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab.

*Keempat*, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni pemusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak.

*Kelima*, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain.

*Keenam*, *trial and error* (percobaan dan salah) dalam demokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan

dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

### **2.1.2 Macam-Macam Demokrasi**

Demokrasi dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis sudut pandang (Rochmadi; 2012) sebagai berikut.

- a. Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.
  1. Demokrasi langsung, berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam sistem pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara secara langsung.
  2. Demokrasi tidak langsung, berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapannya biasanya melalui pemilihan umum.
- b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian (tujuannya), dibedakan menjadi 3 tiga, sebagai berikut.
  1. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, terdapat pada negara-negara liberal.
  2. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dibidang ekonomi, sedangkan persamaan dibidang politik dihilangkan, terdapat pada negara-negara komunis.

3. Demokrasi gabungan/campuran adalah demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan serta menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
- c. Demokrasi berdasarkan paham ideologi, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
1. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individualisme. Karakter demokrasi konstitusional antara lain, kekuasaan pemerintahannya tidak diperkenankan terlalu ikut campur dalam permasalahan warga negaranya, dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi konstitusi.
  2. Demokrasi rakyat (demokrasi proletar) adalah demokrasi yang berfaham pada ajaran marxisme, leninisme, dan komunisme yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial dalam masyarakat.

### **2.1.3 Perilaku Budaya Demokrasi**

Menurut Rusli Karim (1991: 24) dikatakan bahwa perilaku dan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian demokratis adalah inisiatif, disposisi, toleransi, cinta akan keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab serta memiliki kerjasama dalam keterhubungan.

Budaya demokrasi dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat dan negara. Menurut Rochmadi (2012: 43) contoh perilaku yang merupakan perwujudan budaya demokratis, sebagai berikut.

1. Budaya demokrasi di lingkungan Rumah

- a. Bersikap terbuka terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lain.
  - b. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan serta tidak memaksakan kehendak.
  - c. Mencoba memahami keadaan kesulitan yang dialami keluarga dengan baik.
  - d. Menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.
2. Budaya demokrasi di lingkungan sekolah
- a. Bersikap saling menghormati dan menghargai dengan sesama warga disekolah (kepala sekolah, guru, teman dan warga sekolah yang lain).
  - b. Menyelesaikan setiap persoalan yang ada dilingkungan kelas ataupun sekolah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat (misalnya, saat pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan penyusunan kelompok piket).
  - c. Dapat melaksanakan keputusan yang diambil sebagai kesepakatan bersama dengan penuh tanggung jawab.
  - d. Melibatkan semua pihak dalam memecahkan setiap persoalan yang ada di sekolah.
3. Budaya demokrasi di lingkungan Masyarakat dan Negara.
- a. Saling menghormati dan menghargai dengan sesama orang lain di lingkungan masyarakat dan negara.
  - b. Memecahkan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - c. Ikut melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.

d. Bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun dapat berperan serta dalam pemilihan umum yang berlangsung sejak orde lama hingga masa reformasi. Keikutsertaan dalam pemilu ini harus dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **2.2 Demokrasi Di Sekolah**

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Menurut Hendry B. Mayo dalam Winarno (2011: 98) menyebutkan delapan nilai demokrasi, sebagai berikut.

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
3. Pergantian penguasa dengan teratur.
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin.
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan ilmu pengetahuan.
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto (2002: 31-37) meliputi:

1. Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka.
2. Kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari.
3. Kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi meliputi: (1) pemberian suara dalam pemilu; (2) melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah; (3) melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah; (4) mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik.
4. Kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianism merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Kesetaraan di sisi diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama.
5. Rasa percaya (*Trust*). Jika rasa percaya tidak ada maka besar kemungkinan pemerintahan akan sulit menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat kelangkaan rasa percaya.

6. Kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu dimiliki warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Menurut Muhaimin (2002: 11) nilai yang penting dalam demokrasi yaitu, kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah, saling menghargai dan ketundukan kepada *rule of law* yang pada akhirnya dapat menjamin terlindungnya hak asasi manusia.

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

### **2.2.1 Konsep Pendidikan Demokrasi**

Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan pada diri peserta didik berupa pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan dan kemauan, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara merupakan kegiatan dan proses politik.

Dalam level yang lebih kongkrit, pendidikan demokrasi dapat dilihat sebagai suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktekkan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan demokrasi juga memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, baik pada level local, daerah kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun level global.

Pendidikan dapat memunculkan sikap warga negara yang menyadari akan kepentingan bersama dan peranan warga negara dalam kehidupan yang demokratis, seperti yang disampaikan Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad XXI (1996: 40-41), jika pendidikan sudah mengembang di dalam diri setiap orang akan memunculkan kemampuan seseorang untuk bertingkah laku sebagai seorang warga negara yang menyadari kepentingan kolektif dan memainkan perannya dalam kehidupan yang demokratis.

Pendidikan demokrasi harus menekankan pada enam aspek ( Zamroni, 2011: 28), sebagai berikut.

1. Kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. Materi pembelajaran harus memiliki bobot teoritis dan dipadukan dengan realitas masyarakat sekitar. Dengan demikian materi pendidikan demokrasi tidak sekedar informasi tanpa makna sekedar konsumsi ingatan pada diri siswa, melainkan merupakan materi yang mendorong siswa untuk mengembangkan *critical thinking* dan kemauan untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Materi pendidikan demokrasi dibawa keruang-ruang kelas tidak hanya bersifat “pengetahuan teoritis murni” melainkan dipadukan “*controversial issues*” yang tengah merebak di masyarakat.
3. Pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada para siswa.
4. Dilaksanakan pendidikan ekstra kurikuler yang merupakan kegiatan dengan tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap dalam kegiatan sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan yang belum tercakup pada kegiatan intra kurikuler, seperti kepemimpinan, kemampuan merancang masa depan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk bekerjasama dan memecahkan masalah secara damai.
5. Dikembangkan partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Pengambilan keputusan bersama hanya bisa dilakukan apa bila ada partisipasi dari seluruh *stakeholders*, terutama siswa dan orang tua siswa. Partisipasi memerlukan aktivitas kedua belah pihak.
6. Dilaksanakannya simulasi proses demokrasi di sekolah. Apa yang ada di masyarakat berkaitan dengan demokrasi perlu dikembangkan di sekolah, sesuai dengan prinsip pendidikan.

Pengembangan demokrasi di sekolah selain dalam proses pembelajaran dikelas juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler misalnya OSIS. OSIS sebagai organisasi di lingkungan sekolah menjadi tempat pembelajaran siswa dalam mengembangkan demokrasi karena didalam OSIS siswa dituntut untuk dapat melaksanakan nilai-nilai atau budaya demokrasi. Demokrasi dalam OSIS

dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan secara demokratis

### **2.2.2 Pendidikan Untuk Demokrasi**

Pendidikan harus mampu menciptakan generasi-generasi yang “demokratis”. Tanpa generasi-generasi yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa, dengan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat yang demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan.

Ide dan cita-cita akan demokrasi harus ditanamkan di kalangan warga muda bangsa, antara lain lewat pendidikan. Menurut Zamroni (2011: 40) setiap sistem pendidikan dapat dianalisis ke dalam tiga level, yaitu:

1. Level ideologi, yang pada intinya merupakan jawaban atas apa itu pendidikan? Untuk apa pendidikan itu? Jawabannya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk menapak hidup dan kehidupan di masa depan.
2. Level kebijakan dan manajemen. Kebijakan dan manajemen sekolah bisa dikelola secara sentralisasi atau desentralisasi. Kebijakan sentralistik akan menghasilkan manajemen pendidikan yang dikelola secara terpusat. Pengambilan keputusan berkaitan dengan sekolah akan ditentukan oleh pusat, di Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan manajemen sentralisasi menimbulkan persoalan profesionalitas guru yaitu

apakah guru melaksanakan tugas pembelajaran sebagai seorang pegawai yang harus tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada. Sedangkan manajemen desentralisasi yakni kebijakan manajemen pendidikan ditentukan propinsi atau kabupaten/kota.

3. Level praktek, pada lingkup praktek ini, proses sekolah dapat dilihat dari dua level yaitu level sekolah atau level kelas. Level kelas adalah pada pendekatan pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dan guru berkaitan dengan materi tertentu dilaksanakan. Pada level sekolah menyangkut kepemimpinan kepala sekolah dan kultur sekolah.

### **2.2.3 Tujuan Pelaksanaan Demokrasi di Sekolah**

Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi, layaknya masyarakat mini yang memiliki warga dan peraturan. Sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial.

Menurut Suparno (2004: 57) dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan ketrampilan intelktual, ketrampilan pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat.

Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Menurut Rosyada (2004: 15) mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Beane dalam Rosyada (2004: 16) mengemukakan bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis terdiri:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.
5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.

7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis.

Menurut Zamroni, (2001: 65) kultur atau nilai demokrasi antara lain sebagai berikut.

1. Toleransi.
2. Kebebasan mengemukakan pendapat.
3. Menghormati perbedaan pendapat.
4. Memahami keanekaragaman.
5. Terbuka dan komunikasi.
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.
7. Percaya diri.
8. Tidak menggantungkan pada orang lain.
9. Saling menghargai.
10. Mampu mengekang diri.
11. Kebersamaan.
12. Keseimbangan.

Secara prinsip demokrasi tercipta karena adanya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keadaan ini menciptakan suasana kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan, agama, derajat atau status ekonomi. Dengan demikian manusia mempunyai ruang untuk mengekspresikan diri secara bertanggung jawab. Situasi seperti inilah yang seharusnya dibangun dalam dunia pendidikan, anak diajak untuk mengembangkan potensi diri.

#### **2.2.4 Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah**

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah-satu fungsi pendidikan nasional seperti tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Dalam pendidikan di sekolah diupayakan mampu menabur benih-benih demokrasi kepada peserta didik dan melahirkan demokrat-demokrat yang ulung, cerdas, dan andal. Dunia pendidikan perlu diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik.

Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentuk mental peserta didik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan-persoalan yang tentunya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan.

Salah satu cara pengembangan budaya atau nilai demokrasi yaitu melalui proses pendidikan demokrasi. Pendidikan sekolah diharapkan dapat melahirkan warga negara yang cerdas dan demokratis. Kewajiban sekolah untuk dapat menaburkan benih-benih demokrasi pada siswa didiknya merupakan amanat undang-undang.

Seperti telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Melalui proses pendidikan demokrasi dapat menghasilkan manusia yang demokratis yang memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat demokratis yang dapat memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan.

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang “demokratis”. Tanpa manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas ide dan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan (Zamroni, 2011: 39).

Berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sekolah menanamkan nilai-nilai/budaya demokrasi salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai-nilai/budaya demokrasi dilakukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan. Melalui kegiatan kesiswaan diharapkan mampu membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008.

Tujuan pembinaan kesiswaan:

- a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat dan kreativitas.
- b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
- c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.
- d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

## **2.3 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)**

### **2.3.1 OSIS Sebagai Organisasi**

Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA terdapat organisasi yang berbagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat intern sekolah itu sendiri, dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sebagian ada yang mengarah pada hal-hal bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar.

Akibat organisasi siswa mempunyai hubungan dengan organisasi siswa diluar sekolah, maka timbullah loyalitas ganda, disatu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedang dipihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah.

Banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untu kepentingan organisasi di luar sekolah. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah, ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa di sekolah masing-masing, setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti luhur.

Pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intra sekolah perlu ditata secara terarah dan teratur. Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa, maka ditetapkan “OSIS” sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama “Empat Jalur Pembinaan Kesiswaan”, sebagai berikut.

1. Organisasi Kesiswaan
2. Latihan Kepemimpinan
3. Kegiatan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan wawasan Wiyatamandala

#### **2.3.1.1 Strategi Pembinaan dalam OSIS**

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah yang merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.

Organisasi siswa intra sekolah pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah dasar luar biasa adalah organisasi kelas. Organisasi siswa intra sekolah

pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar atas dan sekolah menengah kejuruan adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sehingga jelas Sasaran pembinaan kesiswaan meliputi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan.

OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah yang masing-masing mempunyai pengertian organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra berarti terletak di dalam. Sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah atau Sekolah/Madrasah yang sederajat.

### **2.3.1.2 Tujuan Pembinaan Kesiswaan**

Tujuan Pembinaan kesiswaan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan sebagai berikut.

1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas.
2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
3. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.
4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

### **2.3.1.3 Arah Pembinaan dan Pengembangan OSIS**

Didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, maka arah pembinaan dan pengembangan OSIS SMA Negeri 1 Abung Semuli adalah sebagai berikut.

1. Mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idelaisme, kepribadian dan budi pekerti luhur.
2. Mendorong sikap, jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar.
3. Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berfikir, wawasan, dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) perlu ditata secara terarah dan teratur.

#### **2.3.1.4 Wawasan Wiyata Mandala**

Memperhatikan kondisi sekolah dan masyarakat dewasa ini yang umumnya masih dalam taraf perkembangan, maka upaya pembinaan kesiswaan perlu diselenggarakan untuk menunjang perwujudan sekolah sebagai Wawasan Wiyatamandala.

Berdasarkan surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan dan kebudayaan, mengeterapkan Wawasan Wiyatamandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut

1. Sekolah merupakan wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan diluar bidang pendidikan.
2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan sebagai berikut.
  1. Meningkatkan ketakwaan teradap Tuhan yang maha Esa.
  2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.

3. Mempertinggi budi pekerti.
  4. Memperkuat kepribadian.
  5. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan.
  4. Para guru, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya.
  5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak, dapat menimbulkan pertentangan antara kita sama kita.

Untuk mengimplementasikan Wawasan Wiyatamandala perlu diciptakan suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap.

Upaya untuk mewujudkan Wawasan Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap.

### **2.3.2 Budaya Demokrasi dalam OSIS**

Organisasi adalah tempat manusia berinteraksi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berinteraksi karena mempunyai kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan merupakan syarat utama manusia bersedia masuk dalam suatu organisasi organisasi tertentu.

Proses perkembangan manusia dalam mengelola organisasi agar lebih efektif untuk mencapai kepentingannya maka alat kerja dan metode kerja organisasi disesuaikan dan diperbaiki terus menerus sepanjang waktu melalui proses untuk meringankan beban manusia untuk mencapai kepentingannya.

Menurut Darsono (2009: 57) hampir semua organisasi mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, anggaran, program kerja, standar pelaksanaan, teknik pengendalian, dan teknik evaluasi. Visi menyatakan “kita ingin menjadi apa”; misi menyatakan “apa yang harus diperbuat”; tujuan ialah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang; sasaran ialah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek; strategi ialah cara untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien; kebijakan adalah norma-norma untuk mencapai sasaran; anggaran ialah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran dan tujuan; program kerja ialah rincian sasaran jangka pendek; standar pelaksanaan ialah ukuran-ukuran fisik dan keuangan untuk melaksanakan program kerja; teknik pengendalian ialah upaya agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari kebijakan; dan teknik evaluasi ialah membandingkan kinerja dengan standard dan anggaran.

Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi dan peranan. Demikianlah pada OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pola beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. OSIS merupakan organisasi yang dilaksanakan oleh siswa sebagai tempat untuk pembelajaran bagi siswa dalam berorganisasi. OSIS sebagai tempat pembelajaran siswa maka pelaksanaan kegiatan OSIS dilaksanakan secara demokratis sehingga siswa dapat memahami makna demokrasi dalam organisasi. Dalam kegiatan OSIS siswa diajarkan bagaimana memilih pemimpin secara demokratis, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan sebagainya.

Sebagai suatu organisasi perlu pula memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan, agar OSIS sebagai organisasi tetap hidup dalam arti tetap memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan.. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar OSIS tetap eksis sebagai berikut.

1. Sumber daya.
2. Efisiensi.
3. Koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan
4. Pembaharuan
5. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar
6. Terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen.

Berdasarkan prinsip-prinsip organisasi tersebut agar OSIS selalu dapat mewujudkan peranannya sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan perlu di pahami apa sebenarnya arti, peran dan manfaat apa saja yang diperoleh melalui

OSIS tersebut. Sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan, peranan OSIS adalah:

#### 1. Sebagai Wadah

Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di Sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Oleh sebab itu OSIS dalam mewujudkan fungsinya sebagai wadah. Wahana harus selalu bersama-sama dengan jalur lain, yaitu latihan kepemimpinan, pembentukan sikap demokratis ekstrakurikuler, dan wawasan wiyatamandala. Tanpa saling berkerjasama dari berbagai jalur, peranan OSIS sebagai wadah tindakan berfungsi lagi.

#### 2. Sebagai Penggerak / Motivator

Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina, pengurus mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perubahan, dan yang paling penting memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan bahasa manajemen OSIS mampu memainkan fungsi intelektual, yaitu mampu meningkatkan keberadaan OSIS baik secara internal maupun eksternal. Apabila OSIS dapat berfungsi demikian sekaligus OSIS berhasil menampilkan peranannya sebagai motivator.

### 3. Peranan yang bersifat preventif

Apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti : menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Peranan Preventif OSIS akan terwujud apabila peranan OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan.

Melalui peranan OSIS tersebut dapat ditarik beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air.
3. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur.
4. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan.
5. Meningkatkan sikap demokratis pada siswa.
6. Meningkatkan ketrampilan, kemandirian dan percaya diri.
7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
8. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni.

## 2.4 Kerangka Pikir

Budaya demokrasi pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tidak lepas dari peran serta Pembina OSIS, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dan seluruh pengurus OSIS, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka diperlukan suatu kerangka pikir.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Budaya Demokrasi Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMAN 1 Abung Semuli

Berdasar pada kerangka pikir diatas yang akan dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan, observasi dan studi dokumentasi pada OSIS tentang bagaimana budaya/nilai demokrasi dilaksanakan pada OSIS dan faktor penghambat dan pendukung pengembangan budaya demokrasi. Pada akhirnya

akan ditemukan bagaimana budaya demokrasi pada Organisasi Siswa Intra Sekolah.

## **2.5 Penelitian yang relevan**

Berikut ini disajikan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Relevansinya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian yang berkaitan dengan budaya demokrasi.

Menurut hasil penelitian dari Pramita (2010) yang berjudul “Pelaksanaan Budaya Demokrasi disekolah (Study Kasus Terhadap Siswa SMPN 4 Malang)”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Pemahaman siswa terhadap konsep demokrasi tergolong baik. (2) Pelaksanaan budaya demokrasi yang umumnya diterapkan disekolah adalah pemilihan kepengurusan OSIS, pemilihan kepengurusan MPK, dan pemilihan pengurus kelas, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran nyata dalam berpolitik secara demokratis pada tataran sekolah. (3) Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan budaya demokrasi disekolah yaitu tersedianya wadah pembelajaran berorganisasi bagi siswa yaitu OSIS dan MPK; adanya keleluasaan untuk mengemukakan pendapat pada saat musyawarah; kerjasama yang baik antar siswa dan antara siswa dengan sekolah dalam penyelenggaraan pemilihan di sekolah; diberikannya kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan baik itu pemilihan OSIS, MPK dan pemilihan ketua kelas. (4) Faktor penghambat dari pelaksanaan budaya demokrasi disekolah yaitu kurangnya kesadaran siswa untuk ikut serta dalam pemilihan di sekolah, salah satunya pemilihan ketua OSIS; sifat malu bertanya ataupun mengemukakan pendapat yang terkadang ada di diri siswa.

Adanya pengaruh negative dari guru yang terlalu keras dalam mengajar siswa juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan budaya demokrasi di sekolah.

(5) Solusi untuk mengatasi faktor penghambat yaitu pentingnya kesadaran diri yang harus dimiliki oleh setiap siswa pada pelaksanaan kegiatan musyawarah di sekolah; pemberian peringatan pada siswa yang tidak mengikuti pelaksanaan pemilihan di sekolah; keikutsertaan guru dalam pelaksanaan jalannya musyawarah yang dilakukan oleh siswa; kesabaran guru dalam menghadapi siswa.